Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Vol 06 No 01 Maret 2025 (1-14)
https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index
Prefix 10.47134

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung

Febrian Arga Wahyudi[1]*, Nora Eka Putri[2]
[1,2] Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini mengungkap bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung ditunjuk sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil monev yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN RB) pada tahun 2022, Kabupaten Sijunjung meraih indeks SPBE nomor 2 terendah di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indeks sebesar 2,18% (adil). Peneliti menggunakan metode penelitian kuasi kualitatif (Quasi Qualitative) dengan pendekatan desain penelitian sederhana (SRD). Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari sekretaris daerah, tiga pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dan 5 pegawai dari masing-masing OPD yang penulis pilih untuk penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi e-Government menurut Indrajit, diperoleh hasil bahwa dalam pengembangan aplikasi tidak semua OPD berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian telah dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sijunjung kepada seluruh operator di instansi pelaksana SPBE. Terkait ketersediaan infrastruktur jaringan, masih banyak titik flashing jaringan di Kabupaten Sijunjung. Peraturan daerah terkait pengelolaan SPBE telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Pengadaan sumber daya manusia difokuskan pada penambahan pegawai yang paham pemrograman, dan modal yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE menggunakan APBD dengan anggaran terbatas.
Keywords: SPBE, E-Government, Good Governance

DOI: https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.185
*Correspondence: Nora Eka Putri
Email: noraekaputri@fis.unp.ac.id

Received: 11-01-2025
Accepted: 13-02-2025
Published: 01-03-2025

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This research reveals how the Electronic-Based Government System is implemented in the Sijunjung Regency Communication and Information Service. In accordance with Sijunjung Regent Regulation Number 29 of 2019, the Sijunjung Regency Communication and Information Service was appointed as the agency responsible for the application of information and communication technology in the implementation of SPBE in Sijunjung Regency. Based on the results of monitoring and evaluation carried out by the Ministry of State Apparatus Empowerment, Reform and Bureaucracy (Kemen PAN RB) in 2022, Sijunjung Regency achieved the lowest SPBE index number 2 in West Sumatra Province with an index value of 2.18% (fair). Researchers used a quasi-qualitative research method (Quasi Qualitative) with a simple research design (SRD) approach. The informants in this research consisted of 9 people consisting of the regional secretary, three employees of the Communication and Information Department and 5 employees from each OPD who the author chose for research using purposive sampling. The data collection techniques applied in this research are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis applied in this research uses triangulation techniques. Based on the results of the analysis using e-Government implementation theory according to Indrajit, the results obtained were*

that in application development not all OPDs coordinated with the Communication and Information Department in developing applications. Then training and competency development has been carried out by the Sijunjung district communications and information services office for all operators in agencies implementing SPBE. Regarding the availability of network infrastructure, there are still many network flashing spots in Sijunjung Regency. Regional regulations related to SPBE management have been prepared by the regional government of Sijunjung Regency. Human resource procurement is focused on adding employees who understand programming, and the capital used in implementing SPBE uses APBD with a limited budget.

Keywords: *SPBE, E-Government, Good Governance*

Pendahuluan

Youssef & Diab menjelaskan bahwa pemerintahan digital dikonseptualisasikan sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya Internet, sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Berbagai penelitian telah mengevaluasi dampak *e-government* serta bagaimana hal itu memengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan kinerja pejabatnya. Sebagai contoh, Arshad dan Khurram mencatat bahwa penyediaan informasi yang berkualitas oleh lembaga pemerintah melalui media sosial menjadi indikator transparansi dan keterlibatan pemerintah terhadap masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan di antara warga. Selain itu, seperti yang diuraikan oleh Hartanto dan rekan-rekannya, kehadiran pejabat pemerintah di media sosial juga mencerminkan akuntabilitas lembaga pemerintah terhadap publik, yang berdampak positif pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat (Frinaldi et al., 2023)

Pemerintah Indonesia juga mendukung mewujudkan pelaksanaan *e-government* dengan dikeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Sesuai Peraturan Presiden tersebut SPBE dilaksanakan dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkulitas dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hartanto dan koleganya, kehadiran pejabat pemerintah di Situs Jejaring Sosial (SNS) menunjukkan tingkat akuntabilitas lembaga pemerintah kepada masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang lebih tinggi di kalangan publik (Frinaldi et al., 2023). Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (*good governance*). Perkembangan era serba digital saat ini melalui adanya penggunaan aplikasi dan website dalam dunia birokrasi harus menjadi salah satu alternatif utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi (Reza & Putri, 2021). Sehingga dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi saat ini pemerintah harus berupaya mewujudkan pelaksanaan *e-government* (Napitupulu, Darmawan, 2020). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan oleh seluruh elemen pemerintahan mulai dari lembaga pemerintah, kementerian, hingga pemerintah daerah.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang juga melaksanakan SPBE dalam tata kelola pemerintahannya. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai *leading sektor* dalam pelaksanaan SPBE terus berupaya mewujudkan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung dengan mulai dibangunnya portal dan aplikasi-aplikasi dalam tugas pemerintahan. Pada awal pelaksanaan SPBE sudah dibangun portal sijunjung.go.id. Kemudian beberapa tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh setiap OPD beberapa juga sudah dibangun aplikasi-aplikasi seperti LHK, SI SUTAN MUDO, dan aplikasi lainnya. Selain itu agar memberikan penegasan dan arahan yang jelas dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga sudah menyusun Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE. Meskipun demikian pelaksanaan SPBE belum dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan dari pelaksanaan SPBE sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 belum tercapai sepenuhnya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) tahun 2022 dengan hasil Pemerintah Kabupaten Sijunjung meraih indeks SPBE 2,18 % (cukup) dan merupakan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang meraih indeks SPBE terendah di Provinsi Sumatera Barat. Berikut peneliti sajikan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2022:

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2022

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,18	Baik
2.	Pemerintah Kabupaten Agam	2,38	Cukup
3.	Pemerintah Kabupaten Pasaman	1,91	Cukup
4.	Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	3,29	Baik
5.	Pemerintah Kabupaten Solok	3,12	Baik
6.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	2,60	Baik
7.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	3,48	Baik
8.	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	3,21	Baik
9.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	2,18	Cukup

10.	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	2,26	Cukup
11.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	2,41	Cukup
12.	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	2,36	Cukup
13.	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,46	Cukup
14.	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,81	Baik
15.	Pemerintah Kota Sawahlunto	2,84	Baik
16.	Pemerintah Kota Solok	2,71	Baik
17.	Pemerintah Kota Padang	3,01	Baik
18.	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,02	Baik
19.	Pemerintah Kota Pariaman	2,64	Baik

Sumber: KeMen PAN RB Nomor 108 Tahun 2023

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Beberapa permasalahan tersebut adalah masih minimnya tenaga ahli yang paham *programmer*. Tenaga ahli *programmer* yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hanya ada dua orang sehingga dalam pengelolaan dan pengintegrasian berbagai aplikasi yang ada dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung belum terkelola secara optimal. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung juga belum memiliki arsitektur SPBE sehingga integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE belum terintegrasi dengan baik. Kemudian terkait jaringan internet di Kabupaten Sijunjung masih belum stabil. Saat ini terdapat 57 titik blid spot yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Sijunjung. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah *blind spot* masih terkendala dalam mengakses layanan SPBE.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai *leading sektor* dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung yang berfokus pada implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya governansi digital sehingga dapat menambah pengetahuan ilmiah serta daat digunakan sebagai bahan informasi yang dapat membantu bagi para peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang tepat mengenai pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi kualitatif (kualitatif semu) yang mengadopsi pendekatan desain simple research. Simple research design merupakan metode penelitian yang straightforward yang melibatkan lima tahap, yakni pemahaman konteks sosial dan pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, metode penelitian dan pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan (Bungin, 2020). Dalam hal pemilihan partisipan, metode yang digunakan adalah purposive sampling. Partisipan dalam penelitian ini mencakup sekretaris daerah kabupaten Sijunjung, kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten Sijunjung, kepala bidang informatika dinas komunikasi dan informatika kabupaten Sijunjung, pejabat fungsional di bidang teknologi informatika, serta staf yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi di lima instansi berbeda, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKPSDM, BAPPPEDA, dan BKAD Kabupaten Sijunjung. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data diverifikasi menggunakan metode triangulasi teknik. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung

Pada penelitian implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, model SPBE yang dikemukakan oleh Indrajit akan digunakan sebagai landasan analisis Model Indrajit menekankan enam aspek utama yang terkait dengan pengembangan aplikasi *(content development)*, pelatihan dan pengembangan kompetensi *(competency building)*, ketersediaan infrastruktur *(connectivity)*,kerangka dan perangkat hukum *(cyber laws)*, pengembangan sumber daya manusia *(citizen interfaces*, dan permodalan *(capital)*.

Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sijunjung didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung memiliki peran penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 peraturan tersebut, dalam mengelola dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintahan daerah.

Hasil wawancara yang dilakukan pada bulan Juli 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung telah berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Sijunjung. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah aktif dalam menjalankan SPBE sebagai bagian dari tugas

pemerintahannya, dengan dukungan dari berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh dinas tersebut. Setiap OPD melibatkan diri dalam perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan aplikasi, dengan tahapan awal berupa pengajuan surat permohonan. Saat ini, fokus utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyusunan Arsitektur SPBE, sedangkan pembahasan Rencana Induk SPBE masih menunggu karena prioritas saat ini adalah pembuatan arsitektur tersebut.

Dalam pelaksanaan SPBE, Bidang Teknologi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran kunci dan mengawasi tiga seksi penting, yaitu pengembangan aplikasi, tata kelola informatika, dan infrastruktur jaringan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam bidang pengembangan aplikasi yang hanya memiliki dua tenaga ahli programmer, menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa masih ada OPD yang memilih untuk membangun dan mengembangkan aplikasi melalui pihak ketiga atau vendor, meskipun Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 sudah mengatur bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung yang bertanggung jawab dalam pembangunan aplikasi tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan lima instansi terkait implementasi SPBE di Kabupaten Sijunjung. Temuan-temuan ini akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan kerangka teori Indrajit untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi SPBE di wilayah tersebut.

1. Pengembangan Aplikasi *(Content Development)*

Pengembangan aplikasi merujuk pada proses pengembangan perangkat lunak, yang mencakup pemilihan standar teknis, bahasa pemrograman yang digunakan, spesifikasi sistem basis data, desain antarmuka pengguna, dan elemen-elemen lainnya (Amanuha et al., 2021). Dalam konteks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sijunjung, pengembangan aplikasi bertujuan utama untuk modernisasi dan pemenuhan kebutuhan sistem aplikasi yang digunakan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan unik masing-masing OPD dalam menyediakan layanan digital. Dalam pengembangan aplikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung memegang peran kunci, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 yang mengkoordinasikan pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE. Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung menjadi kunci dalam menyusun proses bisnis aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.

Hingga tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil mengembangkan 25 aplikasi yang terintegrasi, namun integrasi ini masih terbatas pada lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Adanya aplikasi dari luar atau aplikasi umum yang terintegrasi belum ada. Oleh karena itu, informasi yang ada dalam aplikasi yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hanya dapat diakses di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Hasil wawancara dengan lima OPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BAPPPEDA, BKAD, dan BKPSDM, menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM telah berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam pengembangan aplikasi. Namun, BKAD melanggar aturan dengan berkolaborasi dengan pihak ketiga atau vendor dalam pengembangan aplikasinya. BAPPPEDA, sementara itu, menggunakan aplikasi umum, yaitu SIPD RI, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan aplikasi yang wajib wajib dipakai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairdarmansyah yang menunjukkan bahwa agenda implementasi SPBE masih relatif parsial (sektoral). Minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik secarakualitas maupun kuantitas—menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPBE (Khaidarmansyah, 2022)

2. **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *(Competency Building)***

Competency Building melibatkan pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi seluruh anggota sumber daya manusia di berbagai sektor pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ini diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai (Amanuha et al., 2021). Di Kabupaten Sijunjung, pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk operator yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE disesuaikan dengan aplikasi yang telah dikembangkan. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai atau operator di berbagai OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait aplikasi yang dikembangkan. Bimtek ini dilaksanakan oleh seksi tata kelola informatika bidang teknologi informatika oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dan dilaksanakan sebanyak 4 kali. Sementara itu, BKAD, yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau vendor dalam pengembangan aplikasinya, memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pelatihan dan pengembangan kompetensi.

3. **Ketersediaan Infrastruktur *(Connectivity)***

Connectivity mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* di suatu wilayah atau daerah tertentu (Amanuha et al., 2021). Dalam konteks Kabupaten

Sijunjung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab terhadap ketersediaan infrastruktur dalam implementasi SPBE. Ini mencakup aspek seperti akses internet, lebar pita (bandwidth), dan server. Namun, meskipun infrastruktur ini telah ada, infrastruktur tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan SPBE secara optimal dalam mengakses layanan tersebut.

Kondisi infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Sijunjung masih sangat terbatas, dengan banyaknya kecamatan dan nagari yang masih merupakan daerah blank spot. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menunjukkan bahwa terdapat 61 titik blank spot yang tersebar di berbagai nagari dan kecamatan di Kabupaten Sijunjung. Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk pemasangan menara mini di daerah-daerah blank spot.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung telah menyewa bandwidth sebesar 300 Mbps per tahun untuk meningkatkan kemampuan jaringan internet dalam mentransfer data dari server ke pengguna. Namun, kapasitas ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan setiap OPD dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Idealnya, kapasitas bandwidth yang disewa adalah 500 Mbps, namun karena kendala anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hanya mampu menyewa dengan kapasitas 300 Mbps.

Server yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung juga masih terbatas. Pengguna layanan dari berbagai OPD yang menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh dinas tersebut sering mengalami gangguan server, yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan di setiap OPD yang berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung.

4. Kerangka dan Perangkat Hukum *(Cyber Laws)*

Cyber Laws mengacu pada regulasi atau perangkat hukum yang diterapkan dalam aktivitas e-government. Kerangka dan perangkat hukum memiliki peran krusial dalam memastikan pelaksanaan e-government di suatu daerah berjalan sesuai ketentuan. Tujuan dari kerangka hukum dalam konteks e-government adalah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperkuat pentingnya pelaksanaan e-government (Amanuha et al., 2021).

Terkait dengan aspek kerangka dan perangkat hukum dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah menerbitkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019. Selanjutnya, untuk memperkuat aspek hukum dalam pelaksanaan SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung juga telah menyusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten

Sijunjung. Saat ini, Peraturan Daerah tersebut masih menunggu persetujuan dari Kanwil Provinsi Sumatera Barat.

5. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Citizen Interfaces)***

Citizen Interfaces merujuk kepada aspek yang berkaitan dengan perekrutan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan berbagai saluran akses yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan e-government (Amanuha et al., 2021). Perekrutan SDM dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai langkah untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Saat ini, kebutuhan SDM yang belum terpenuhi terdapat di seksi pengembangan aplikasi, dengan rencana penambahan 3 orang ahli pemrograman untuk memperlancar tugas pengembangan aplikasi, yang merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan SPBE. SDM yang memiliki kompetensi sebagai pemrogram di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung saat ini hanya terdiri dari dua orang ahli pemrograman. Sementara itu, terkait dengan operator yang menjalankan aplikasi di masing-masing OPD, tidak ada masalah yang signifikan. Setiap OPD telah menunjuk operator masing-masing, baik dari tenaga pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga harian lepas (THL). Sebagian besar operator tersebut sudah memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), meskipun mereka tetap menerima pelatihan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairdarmansyah yang menunjukkan bahwa minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik secarakualitas maupun kuantitas—menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPBE (Khaidarmansyah, 2022)

6. ***Capital* (Permodalan)**

Capital adalah aspek yang berhubungan dengan struktur pendanaan dalam proyek E-government, terutama yang menyangkut biaya yang muncul setelah proyek selesai, seperti untuk pemeliharaan dan pengembangan. Dalam konteks ini, tim harus mempertimbangkan berbagai model pendapatan yang dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan (Amanuha et al., 2021).

Di Kabupaten Sijunjung, pendanaan telah dilaksanakan sesuai dengan situasi anggaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengadaan sistem, layanan jaringan, pengembangan aplikasi, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, serta komponen lain dalam pelaksanaan SPBE, dana atau modal yang digunakan berasal dari alokasi

anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung

1. Faktor Pendukung

a. Komitmen Pemerintah

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara yang dilakukan pada bulan Juli 2023, ditemukan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menunjukkan berkomitmen dalam pelaksanaan SPBE. Bukti dari komitmen ini adalah pengakuan bahwa SPBE dianggap sebagai indikator kinerja utama pemerintah. Selain itu, untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan SPBE, pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menerbitkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 dan juga menyusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan SPBE. Selain itu, telah banyak aspek tugas pemerintahan yang telah mengalami proses digitalisasi, seperti penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diterapkan mulai dari bupati hingga kepala kasi.

b. Data dan Informasi yang Akurat dan Terpercaya

Dalam konteks pemberian pelayanan kepada masyarakat, pentingnya data dan informasi yang akurat dan terpercaya menjadi faktor kunci. Sebagaimana disorot oleh Napitupulu (Darmawan, 2020), untuk memastikan masyarakat menerima data dan informasi yang tepat, pemerintah perlu secara berkala mengupdate data dan informasi yang tersedia. Namun, temuan terbaru yang diungkapkan dalam hasil wawancara pada bulan Juli 2023 menggambarkan kondisi yang menunjukkan perkembangan dalam hal penyebaran data dan informasi di Sijunjung.

Aplikasi seperti Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) serta Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) telah dibangun dengan tujuan memudahkan pengelolaan dan penyampaian dokumen kepada masyarakat oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, website resmi infopublik.sijunjung.go.id selalu diperbarui secara berkala untuk memastikan arus informasi terkini, termasuk informasi seputar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan informasi publik lainnya.

2. Faktor Penghambat

a. Keaktifan Tim Koordinasi SPBE

Hasil temuan dari wawancara yang dilakukan pada bulan Juli 2023 mengindikasikan bahwa untuk mendukung koordinasi yang baik dalam pelaksanaan SPBE, tim koordinasi SPBE telah dibentuk. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung dan didirikan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh bupati, dengan SK ini diperbarui setiap tahun. Namun, meskipun tim koordinasi ini dibentuk sejak tahun 2022, belum ada rapat yang dilaksanakan oleh tim ini. Hal ini mengakibatkan pembahasan mengenai SPBE tidak terjadi secara efektif. Misalnya, dalam bidang organisasi, kurangnya koordinasi telah menyebabkan proses bisnis kabupaten belum siap, sehingga arah pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung belum sepenuhnya jelas.

b. Anggaran

Hasil temuan dari wawancara pada bulan Juli 2023 menyiratkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sijunjung saat ini masih terbatas. Keterbatasan anggaran ini mengakibatkan bahwa pembiayaan dalam pelaksanaan SPBE tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dalam hal ini, anggaran yang terbatas telah mempengaruhi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung untuk menyewa bandwidth dan memasang Base Transceiver Station (BTS) sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan untuk pengadaan jaringan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan wawancara, saat ini anggaran dalam pelaksanaan SPBE lebih difokuskan pada pembiayaan infrastruktur jaringan.

c. Data dan Informasi yang Akurat dan Terpercaya

Meskipun ada kemajuan dalam hal ini, masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan data dan informasi. Terdapat kendala dalam memperoleh data secara elektronik, yang menciptakan kerumitan dalam akses informasi. Penulis merinci bahwa untuk mengakses data yang diperlukan, ia harus melalui proses pendaftaran akun dan login di portal PPID. Namun, penulis mengalami kesulitan dalam mendapatkan kode akses yang dibutuhkan, menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai PPID Utama masih belum maksimal. Berdasarkan pengalaman penulis dalam memperoleh data dan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan masih sulit penulis memperoleh data tersebut secara elektronik. Ketika penulis meminta data penulis diminta untuk mengakses PPID dan mengambil data yang penulis butuhkan. Dalam portal PPID tersebut penulis mendaftar akun dan

login di dalam portal PPID tersebut. Nantinya akan dikirim ke *e-mail* penulis kode untuk bisa mengakses layanan PPID tersebut. Namun ketika penulis menunggu dan juga sudah mengkonfirmasi sampai saat ini penulis belum mendapatkan kode tersebut sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan data dan informasi belum dikelola dengan baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung sebagai PPID Utama.

Kesimpulan

Hasil akhir penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung belum dilaksanakan secara maksimal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019. Saat ini Diskominfo Kabupaten Sijunjung berfokus pada penyusunan arsitektur SPBE. Berdasarkan analisis menggunakan teori yaitu teori *warf*, mengenai pelaksanaan *e-government* didapat gambaran bahwa: kepemimpinan, kepemimpinanan dalam pelaksanaan SPBE sudah terlihat dengan jelas yang dibuktikan dijadikan SPBE ini sebagai indikator kinerja pemerintah; Kerjasama Dari Para Birokrat, sudah terbentuk tim koordinasi SPBE tetapi tim ini belum aktif;Anggaran dalam pelaksanaan SPBE masih terbatas sehingga pembiayaan dalam pelaksanaan SPBE belum bisa dilakukan secara menyeluruh; Kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah memiliki Perbup Nomor 29 Tahun 2019 dan saat ini sudah menyusun Perda mengenai pengelolaan SPBE;Laporan dan Evaluasi Keberhasilan dan Kegagalan Pemerintah Dalam pelaksanaan *e-government* dilakukan oleh Inspektorat daerah sebagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi dari KemenPAN RB.

Daftar Pustaka

Amanuha, G., Hasanah, B., Sururi, A., & Sukendar, S. (2021). Digitalisasi Pemerintahan Melalui Implementasi SIMRAL dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Daerah. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, *1*(2), 126-134.

Bungin, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Kencana.

Frinaldi, A., Putri, N. E., Embi, M. A., & Afdalisma. (2023). Public Sector Performance and Digital-Governance Effectiveness Predicted by Community Happiness as a Representation of Culture. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *10*(2), 90–108. https://doi.org/10.29333/ejecs/1398

Khaidarmansyah. (2022). Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen*, *16*(1), 85–95.

Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, *11*(2), 101–112. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2898-Article Text-11413-2-10-20210323.pdf

Napitupulu, Darmawan, D. (2020). E- Government: Implementasi, Strategi, dan Inovasi. In *Nucl. Phys.*

Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, *2*(1), 32–42.

Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Goverment Dalam Mewujudkan Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Penerapan E-Goverment Dalam Mewujudkan Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa*, *9*, 130–139.

Reza, A. O., & Putri, N. E. (2021). Efektivitas Web Desa tiumang.desa.id Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *5*(4), 1033–1042. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2421

Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *21*(1), 44–58. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government